

Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Reza Febrianto Kasim¹, Ghani Candra Murti², Julita Elnisa Putri Nur Aisyah³, Nadia Azzaira Azmarani⁴, Yuliana Ristantya Ningsih⁵

¹²³⁴⁵ Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Keywords: *anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten kebumen, rasio keuangan, pertumbuhan ekonomi*

Article history

Submitted: 01-04-2025

Accepted: 05-04-2025

Revised: 12-05-2025

Available online: 01-06-2025

Published regularly:

June 2025

*Corresponding Author

Email adress:

rezakasim16@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan rasio APBD dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2023 dengan menggunakan enam rasio keuangan: pertumbuhan pendapatan, kemandirian daerah, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, efisiensi, dan keserasian belanja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengandalkan data laporan realisasi APBD. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Bupati Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio APBD Kabupaten Kebumen 2019-2023 menunjukkan efektivitas PAD yang baik. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pertumbuhan pendapatan, kemandirian fiskal, dan alokasi belanja pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas alokasi anggaran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Selain itu, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan APBD untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah.

How to Cite: Kasim, R. F., Murti, G. C., Aisyah, J. E. P. N. A., Azmarani, N. A., & Ningsih, Y. R. (2025). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 4(1), 58-77. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2420>

INTRODUCTION

Dikutip dari Pemkab Buleleng, perekonomian atau pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya (kebumenkab.go.id).



Perekonomian dari suatu daerah tentu tidak terlepas dari peran sentral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mana dalam undang-undang tersebut daerah diberikan kebebasan untuk membangun serta mengembangkan wilayah daerah tersebut sesuai dengan apa yang daerah tersebut butuhkan dan prioritaskan. Dikeluarkannya undang-undang tersebut tentunya akan memberikan konsekuensi yang logis untuk masing-masing daerah agar bertanggung jawab atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif serta efisien terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan baik apabila mendapatkan dukungan keuangan yang memadai dan alokasi yang adil dan merata, serta memiliki indikator yang jelas. Anggaran dapat dijadikan pedoman bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Pada instansi pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang penting dalam melaksanakan otonomi daerah. APBD dijadikan sebagai pedoman dalam mendistribusikan anggaran daerah (Zaelani dkk., 2022). Anggaran suatu komponen yang sangat utama untuk melaksanakan suatu program atau rencana yang telah dirancang atau diagendakan terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan dalam merealisasikan atau mencapai suatu program atau rencana yang telah ditetapkan, terlebih dahulu harus melakukan perencanaan yang sangat matang (Yulianto dkk., 2022).

Ma'ruf dkk. (2024) menyatakan bahwa agar dana negara dapat digunakan secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab maka penggunaan APBD harus transparan, dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat pengawasan yang membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang ketat serta transparan memungkinkan setiap adanya pelanggaran yang dilakukan untuk diidentifikasi serta ditindaklanjuti dengan cepat yang mana akan membuat pemerintahan lebih bersih dan jujur. Transparansi penggunaan APBD dalam pembangunan daerah bukan hanya sebagai kewajiban moral dan hukum bagi pemerintah daerah, tetapi sebagai syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang tentunya efektif, demokratis, serta berkeadilan. Hal ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Zaelani dkk. (2022) menyatakan bahwa salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah untuk pembiayaan serta belanja daerah dalam pembangunan yaitu dengan meningkatkan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. PAD ini mempunyai pengaruh besar terhadap APBD. Semakin besar APBD maka dapat meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang memadai.

Menurut Mudrajad (2004) dalam Indriyani (2016) terdapat indikator penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur pembangunan di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Faktor tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa (Indriyani, 2016). Setiap negara/daerah akan berusaha keras mengoptimalkan agar mencapai pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan (Jonaidi, 2012). Syarat utama dalam menurunkan angka kemiskinan adalah tumbuhnya perekonomian. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah seringkali diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Jonaidi, 2012). Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dapat dinilai belum dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat terlebih pada wilayah pedesaan. Pembangunan yang dilaksanakan masih menciptakan kesenjangan antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan ini diakibatkan adanya ketidakjelasan dan distorsi pembangunan yang lebih berpihak kepada ekonomi perkotaan yang mengakibatkan timbulnya daerah tertinggal dan terbelakang (Zaelani dkk., 2022).



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023 di Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019-2023 diolah)

Dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik pada gambar 1 diperoleh informasi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu 5,41%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 8,06% menjadi -2,65% pada tahun 2020. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, adanya pandemi covid-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak yang signifikan pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dikuatkan lagi oleh Kuncorowati (2022) laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami penurunan, dikarenakan akibat wabah Covid-19 yang melanda, sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tumbuh secara lambat. Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 5,97% sehingga menjadi 3,32%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,99% sehingga menjadi 5,31% dan pada tahun 2023 pun mengalami penurunan 0,33% menjadi 4,98% (BPS 2019-2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2019-2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 3.743.230 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 237.670 jiwa sehingga menjadi 3.980.900 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 128.850 jiwa sehingga menjadi 4.109.750 jiwa. Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 278.310 jiwa sehingga menjadi 3.831.440 jiwa dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 39.940 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin, sedangkan 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Adapun data menurut BPS Jawa Tengah 2019-2023 yang menunjukkan 10 kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 10 Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah

No.	Kabupaten	Tahun (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Kebumen	16,82%	17,59%	17,83%	16,41%	16,34%
2.	Kab. Wonosobo	16,63%	17,36%	17,67%	16,17%	15,58%
3.	Kab. Brebes	16,22%	17,03%	17,43%	16,05%	15,78%
4.	Kab. Pemasang	15,41%	16,02%	16,56%	15,06%	15,03%
5.	Kab. Purbalingga	15,03%	15,90%	16,24%	15,30%	14,99%
6.	Kab. Banjarnegara	14,76%	15,64%	16,23%	15,20%	14,90%
7.	Kab. Rembang	14,95%	15,60%	15,80%	14,65%	14,17%
8.	Kab. Sragen	12,79%	13,38%	13,83%	12,94%	12,87%
9.	Kab. Banyumas	12,53%	12,89%	13,49%	12,33%	12,28%
10.	Kab. Klaten	12,28%	13,26%	13,66%	12,83%	12,53%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019-2023, diolah)

Dari data yang bersumber dari BPS Jawa Tengah 2019-2023 pada tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Angka penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 201.340 jiwa atau sebanyak 16,82%. Jumlah penduduk miskin kemudian meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.750 jiwa atau sekitar 0,77% menjadi 17,59%. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 1.830 jiwa atau sekitar 0,24% sehingga menjadi 17,83%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 16.760 jiwa atau sekitar 1,42% sehingga menjadi 16,41% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 710 jiwa atau sekitar 0,07% sehingga menjadi 16,34%.

Kabupaten Kebumen, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik. Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki kombinasi dataran rendah yang subur di bagian selatan, terutama di wilayah pesisir, dan perbukitan atau pegunungan di bagian utara.

Kondisi ini memberikan potensi besar di sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, dengan komoditas unggulan seperti padi, palawija, dan hortikultura, didukung oleh sistem irigasi yang memadai. Selain itu, dengan garis pantai yang panjang, sektor kelautan dan perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan) juga menjadi potensi strategis. Kabupaten Kebumen dianugerahi berbagai objek pariwisata alam, mulai dari pantai, goa, hingga bentang alam lainnya yang berpotensi menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Meskipun memiliki potensi yang signifikan, Kabupaten Kebumen seperti daerah lainnya, dihadapkan pada tantangan pembangunan ekonomi. Isu-isu seperti tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja yang optimal masih menjadi perhatian (BPS 2024).

Menurut Portal Resmi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, penanganan masalah kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sumberdaya berbasis kearifan lokal. Arif Sugiyanto, selaku Bupati Kebumen pada periode saat itu menyampaikan bahwa strategi tersebut meliputi pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu dengan melibatkan integrasi data basis penentuan sasaran program Kartu Kebumen Sejahtera (KKS). Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen memperkuat pemberdayaan petani dan nelayan miskin sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan prioritas Tani Mulyo. Pengembangan potensi perikanan tangkap dan budidaya kampung garam, serta pemberdayaan pada pelaku usaha mikro, ketenagakerjaan, dan pariwisata (jatengprov.go.id).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rasio APBD dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2023. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas alokasi anggaran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan APBD untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah.

METHOD

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2016) dalam Ardiyasa (2021) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mendalami dan mengetahui makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Bungin (2007) dalam Pilat dan Morasa (2017) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat sebagai bahan penelitian dan berupaya menyajikan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran terkait kondisi, situasi, atau fenomena tersebut. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Bikien (1982) dalam Jelahun (2022) menyebutkan bahwa studi kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu latar, satu individu, satu lokasi penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Terdapat batasan dalam studi kasus yaitu sasaran yang diteliti berupa manusia, latar, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi (Jelahun, 2022).

62



Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dalam rentan waktu tahun 2019 hingga 2023. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Bupati Kebumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi, dengan melakukan penelusuran data dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen tahun 2019 hingga 2023. Halim (2004) dalam Angin dkk. (2023) menyebutkan bahwa Analisis Rasio Keuangan bertujuan untuk mengetahui karakteristik keuangan daerah yang merujuk pada laporan pengelolaan keuangan yang ada. Analisis Keuangan sesuai dengan APBD dilakukan dengan menghitung dan membandingkan hasil dari beberapa tahun anggaran.

Handayani (2017) dalam Alhabsyi dkk. (2024) menyebutkan bahwa APBD berperan sebagai instrumen kebijakan yang memiliki posisi sentral yang harus mengandung kinerja keuangan, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Setianingrum dan Haryanto (2020) dalam Marlina dan Akbar (2023) menyebutkan bahwa Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kemandirian keuangan daerah, mengevaluasi efektivitas realisasi pendapatan, dan mengukur efisiensi pendapatan daerah, sehingga menjadi salah satu alat ukur untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang timbul antar rasio keuangan dapat menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam pengelolaan perekonomian. Rasio Keuangan yang digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Daerah terdiri dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja (Sawitri & Usman, 2023). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dimulai dengan tahapan perhitungan Rasio Keuangan, membandingkan hasil perhitungan Rasio Keuangan dari tahun ke tahun, dan melakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan.

Perhitungan Rasio Keuangan dilakukan dengan cara:

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun, yang menunjukkan seberapa baik daerah dalam meningkatkan pendapatannya (Putri dkk., 2025).

$$\text{Rumus 1} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun}(t) - \text{Realisasi Pendapatan tahun}(t-1)}{\text{Realisasi Pendapatan tahun}(t-1)} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria pengukuran pertumbuhan pendapatan

PERSENTASE	KRITERIA PERTUMBUHAN
76%-100%	BAIK
51%-75%	CUKUP BAIK
26%-50%	KURANG BAIK
0%-25%	TIDAK BAIK



(Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Syukur dkk. (2021))

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung kepada sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal semakin rendah (Hafizah dkk., 2024).

$$\text{Rumus 2} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Nilai kemandirian daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria nilai kemandirian daerah

KEMAMPUAN DAERAH	PERSENTASE KEMANDIRIAN	KEMANDIRIAN
RENDAH SEKALI	0%-25%	INSTRUKTIF
RENDAH	25%-50%	KONSULTATIF
SEDANG	50%-75%	PARTISIPATIF
TINGGI	75%-100%	DELEGATIF

(Sumber: Fathah dalam Wulandari dkk. (2023))

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi dalam Madaniyah & Widiasih, 2024).

$$\text{Rumus 3} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria nilai derajat desentralisasi fiskal

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	POLA HUBUNGAN
0,00-10,00	SANGAT KURANG
10,00-20,00	KURANG
20,00-30,00	SEDANG
30,00-40,00	CUKUP
40,00-50,00	BAIK
>50,00	SANGAT BAIK

(Sumber: Mahmudi dalam Madaniyah & Widiasih (2024))

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Putri dkk., 2025).

$$\text{Rumus 4} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria nilai efektivitas PAD

PERSENTASE EFEKTIFITAS	KRITERIA EFEKTIVITAS
<100%	TIDAK EFEKTIF
100%	EFEKTIVITAS BERIMBANG
>100%	EFEKTIF

(Sumber: Fathah dalam Wulandari dkk. (2023))

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan efisiensi penggunaan biaya untuk memperoleh pendapatan daerah. Semakin rendah nilai Rasio Efisiensi maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah (Putri dkk., 2025).

$$\text{Rumus 5} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

65



Tabel 6. Kriteria nilai efisiensi

PERSENTASE EFISIENSI	KRITERIA EFISIENSI
<100%	EFISIEN
100%	EFISIENSI BERIMBANG
>100%	TIDAK EFISIEN

(Sumber: Fathah dalam Wulandari dkk. (2023))

6. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menunjukkan menilai proporsi antara belanja operasional dan belanja modal dalam total belanja daerah. Menunjukkan keseimbangan antara pengeluaran untuk kebutuhan rutin dan investasi (Putri dkk., 2025).

1) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rumus} \quad 6 = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Operasi

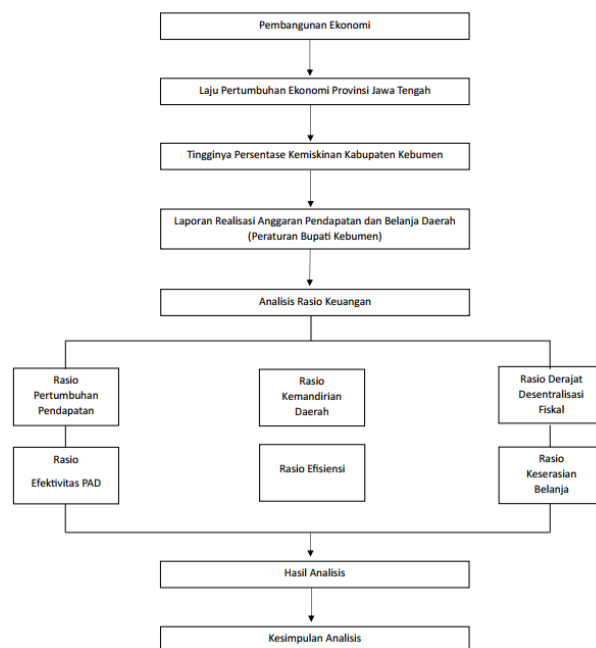
$$\text{Rumus} \quad 7 = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat keserasian belanja modal dan belanja operasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat keserasian belanja modal dan belanja operasi

PERBANDINGAN	TINGKAT KESERASIAN
JUMLAH BELANJA OPERASI > JUMLAH BELANJA MODAL	KURANG BAIK
JUMLAH BELANJA OPERASI = JUMLAH BELANJA MODAL	CUKUP BAIK
JUMLAH BELANJA OPERASI < JUMLAH BELANJA MODAL	BAIK - SANGAT BAIK

(Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Syukur dkk. (2021))



Gambar 2. Skema Pola Pikir Penelitian

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menunjukkan kontribusi dari PAD terhadap total pendapatan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 10. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2019	Rp409.163.433.330	Rp2.818.494.983.541	14,52	Kurang
2020	Rp403.025.963.784	Rp2.763.229.307.230	14,59	Kurang
2021	Rp472.017.087.115	Rp2.832.035.015.733	16,67	Kurang
2022	Rp512.346.375.475	Rp2.847.196.017.404	17,99	Kurang
2023	Rp463.650.961.705	Rp2.901.021.509.721	15,98	Kurang

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio ini mengukur sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Sepanjang periode 2019–2023, nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen berada pada kategori kurang (10–20%), yang menandakan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Pada tahun 2019, PAD hanya berkontribusi sebesar 14,52% terhadap total pendapatan. Pada tahun 2020 naik sedikit ke 14,59%, dan pada 2021 naik lebih signifikan ke 16,67%, namun tetap belum mencapai kategori “sedang” (>20%). Tahun 2022 menunjukkan nilai 17,99%, dan pada 2023 justru menurun ke 15,98%.

Hal ini memperkuat temuan bahwa PAD Kabupaten Kebumen masih belum menjadi pilar utama pendapatan daerah dan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal belum optimal.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kapabilitas daerah dalam melakukan realisasi terhadap anggaran yang telah direncanakan. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Persentase	Kriteria
2019	Rp409.163.433.330	Rp401.170.000.000	101,99	Efektif
2020	Rp403.025.963.784	Rp326.820.579.000	123,32	Efektif
2021	Rp472.017.087.115	Rp398.974.820.000	118,31	Efektif
2022	Rp512.346.375.475	Rp440.433.051.000	116,33	Efektif
2023	Rp463.650.961.705	Rp432.821.047.000	107,12	Efektif

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan. Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal efektivitas PAD, karena selama lima tahun berturut-turut realisasi PAD selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, rasio efektivitas PAD sebesar 101,99%, yang berarti efektif. Tahun 2020 meningkat tajam menjadi 123,32%, menunjukkan bahwa realisasi PAD sangat melebihi target. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 (118,31%), tahun 2022 (116,33%), dan tahun 2023 (107,12%). Walaupun rasio efektivitas ini masuk kategori “Efektif” (>100%), hal ini tidak serta-merta menunjukkan kekuatan PAD secara absolut. Capaian ini bisa juga berarti bahwa target PAD ditetapkan secara konservatif atau tidak ambisius, sehingga mudah tercapai. Namun secara umum, efektivitas dalam pelaksanaan PAD sudah tergolong baik.

5. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan pendapatan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 12. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya untuk Memungut Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Persentase	Kriteria
2019	Rp2.809.549.444.627	Rp2.818.494.983.541	99,68	Efisien
2020	Rp2.737.861.916.080	Rp2.763.229.307.230	99,08	Efisien
2021	Rp2.779.840.698.100	Rp2.832.035.015.733	98,16	Efisien
2022	Rp2.824.358.293.725	Rp2.847.196.017.404	99,20	Efisien
2023	Rp2.977.141.914.829	Rp2.901.021.509.721	102,62	Tidak Efisien

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah. Dalam konteks ini, semakin kecil biaya untuk memperoleh pendapatan maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Selama tahun 2019-2022, Kabupaten Kebumen tergolong *efisien*, karena rasio efisiensi berada di bawah 100%: yaitu 99,68% (2019), 99,08% (2020), 98,16% (2021), dan 99,20% (2022). Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan biaya hingga nilai rasio menjadi 102,62%, yang artinya *tidak efisien*. Ini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir, biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, yang dapat membebani APBD dan mengganggu alokasi dana untuk sektor produktif. Penurunan efisiensi ini perlu dicermati, terutama dari sisi pengeluaran rutin atau biaya pemungutan pendapatan yang tidak terkontrol.

6. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan pengalokasian dana pada belanja modal dan belanja operasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan belanja modal dan belanja operasi Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

1) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rumus 6} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rumus 7} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

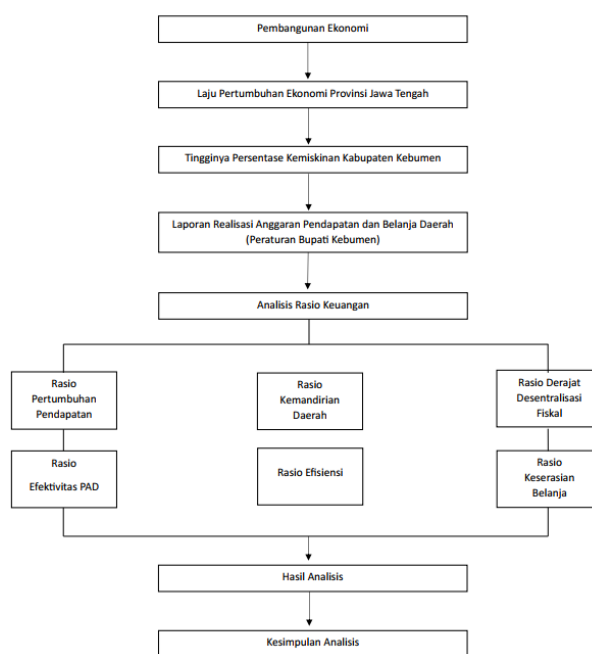
Tingkat keserasian belanja modal dan belanja operasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat keserasian belanja modal dan belanja operasi

PERBANDINGAN	TINGKAT KESERASIAN
JUMLAH BELANJA OPERASI > JUMLAH BELANJA MODAL	KURANG BAIK
JUMLAH BELANJA OPERASI = JUMLAH BELANJA MODAL	CUKUP BAIK
JUMLAH BELANJA OPERASI < JUMLAH BELANJA MODAL	BAIK - SANGAT BAIK

(Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Syukur dkk. (2021))





Gambar 2. Skema Pola Pikir Penelitian

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil

Hasil perhitungan rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan Tahun (t)	Realisasi Pendapatan Tahun (t-1)	Persentase	Kriteria
2019	Rp2.818.494.983.541	Rp2.639.814.864.398	6,77	Tidak Baik
2020	Rp2.763.229.307.230	Rp2.818.494.983.541	-1,96	Tidak Baik
2021	Rp2.832.035.015.733	Rp2.763.229.307.230	2,49	Tidak Baik
2022	Rp2.847.196.017.404	Rp2.832.035.015.733	0,54	Tidak Baik
2023	Rp2.901.021.509.721	Rp2.847.196.017.404	1,89	Tidak Baik

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio Pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan tidak pernah mencapai kategori “Baik”. Pada tahun 2019, pertumbuhan tercatat sebesar 6,77%, yang berarti masih dalam kategori tidak baik menurut klasifikasi Tim Litbang Depdagri (<25%). Tahun 2020 justru mengalami *penurunan* menjadi -1,96% akibat dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2021, pendapatan mengalami peningkatan hingga berada di angka 2,49%, namun tetap tidak mencapai ambang batas “kurang baik” (26%). Tahun 2022, persentase pertumbuhan turun mencapai 0,54%, dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1,89%, tetap dalam kategori *tidak baik*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan daerah sangat rendah dan tidak menunjukkan adanya perbaikan struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah secara jangka panjang.

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu daerah untuk dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari rasio kemandirian Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 9. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Persentase	Kemandirian Daerah
2019	Rp409.163.433.330	Rp1.688.387.155.843	24,23	Instruktif
2020	Rp403.025.963.784	Rp1.624.225.405.094	24,81	Instruktif
2021	Rp472.017.087.115	Rp2.222.632.960.883	21,24	Instruktif
2022	Rp512.346.375.475	Rp2.329.703.641.941	21,99	Instruktif
2023	Rp463.650.961.705	Rp2.435.850.438.454	19,03	Instruktif

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio kemandirian daerah mengindikasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa ketergantungan terhadap dana pusat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh nilai rasio kemandirian Kabupaten Kebumen berada di bawah 25%, yang dikategorikan sebagai instruktif, artinya daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Pada tahun 2019, rasio kemandirian sebesar 24,23%, naik sedikit menjadi 24,81% di tahun 2020. Namun, tren menurun terjadi setelahnya: 21,24% di tahun 2021, 21,99% di 2022, dan mencapai titik terendah di 2023 sebesar 19,03%. Penurunan ini menunjukkan bahwa peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum signifikan dalam menopang belanja dan pembangunan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat mengindikasikan lemahnya inisiatif dan inovasi daerah dalam meningkatkan sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan usaha daerah.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menunjukkan kontribusi dari PAD terhadap total pendapatan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 10. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2019	Rp409.163.433.330	Rp2.818.494.983.541	14,52	Kurang
2020	Rp403.025.963.784	Rp2.763.229.307.230	14,59	Kurang
2021	Rp472.017.087.115	Rp2.832.035.015.733	16,67	Kurang
2022	Rp512.346.375.475	Rp2.847.196.017.404	17,99	Kurang
2023	Rp463.650.961.705	Rp2.901.021.509.721	15,98	Kurang

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio ini mengukur sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Sepanjang periode 2019–2023, nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kebumen berada pada kategori kurang (10–20%), yang menandakan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Pada tahun 2019, PAD hanya berkontribusi sebesar 14,52% terhadap total pendapatan. Pada tahun 2020 naik sedikit ke 14,59%, dan pada 2021 naik lebih signifikan ke 16,67%, namun tetap belum mencapai kategori “sedang” (>20%). Tahun 2022 menunjukkan nilai 17,99%, dan pada 2023 justru menurun ke 15,98%. Hal ini memperkuat temuan bahwa PAD Kabupaten Kebumen masih belum menjadi pilar utama pendapatan daerah dan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal belum optimal.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kapabilitas daerah dalam melakukan realisasi terhadap anggaran yang telah direncanakan. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Persentase	Kriteria
2019	Rp409.163.433.330	Rp401.170.000.000	101,99	Efektif
2020	Rp403.025.963.784	Rp326.820.579.000	123,32	Efektif
2021	Rp472.017.087.115	Rp398.974.820.000	118,31	Efektif
2022	Rp512.346.375.475	Rp440.433.051.000	116,33	Efektif
2023	Rp463.650.961.705	Rp432.821.047.000	107,12	Efektif

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan. Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal efektivitas PAD, karena selama lima tahun berturut-turut realisasi PAD selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, rasio efektivitas PAD sebesar 101,99%, yang berarti efektif. Tahun 2020 meningkat tajam menjadi 123,32%, menunjukkan bahwa realisasi PAD sangat melebihi target. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 (118,31%), tahun 2022 (116,33%), dan tahun 2023 (107,12%). Walaupun rasio efektivitas ini masuk kategori “Efektif” (>100%), hal ini tidak serta-merta menunjukkan kekuatan PAD secara absolut. Capaian ini bisa juga berarti bahwa target PAD ditetapkan secara konservatif atau tidak ambisius, sehingga mudah tercapai. Namun secara umum, efektivitas dalam pelaksanaan PAD sudah tergolong baik.

5. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan pendapatan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

Tabel 12. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya untuk Memungut Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Persentase	Kriteria
2019	Rp2.809.549.444.627	Rp2.818.494.983.541	99,68	Efisien
2020	Rp2.737.861.916.080	Rp2.763.229.307.230	99,08	Efisien
2021	Rp2.779.840.698.100	Rp2.832.035.015.733	98,16	Efisien
2022	Rp2.824.358.293.725	Rp2.847.196.017.404	99,20	Efisien
2023	Rp2.977.141.914.829	Rp2.901.021.509.721	102,62	Tidak Efisien

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah. Dalam konteks ini, semakin kecil biaya untuk memperoleh pendapatan maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Selama tahun 2019-2022, Kabupaten Kebumen tergolong *efisien*, karena rasio efisiensi berada di bawah 100%: yaitu 99,68% (2019), 99,08% (2020), 98,16% (2021), dan 99,20% (2022). Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan biaya hingga nilai rasio menjadi 102,62%, yang artinya *tidak efisien*. Ini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir, biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, yang dapat membebani APBD dan mengganggu alokasi dana untuk sektor produktif. Penurunan efisiensi ini perlu dicermati, terutama dari sisi pengeluaran rutin atau biaya pemungutan pendapatan yang tidak terkontrol.

6. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan pengalokasian dana pada belanja modal dan belanja operasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan belanja modal dan belanja operasi Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023:

1) Rasio Belanja Modal

Tabel 13. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase
2019	Rp365.840.794.028	Rp2.809.549.444.627	13,02
2020	Rp288.801.049.018	Rp2.737.861.916.080	10,55
2021	Rp266.110.950.340	Rp2.779.840.698.100	9,57
2022	Rp272.301.599.864	Rp2.824.358.293.725	9,64
2023	Rp278.842.913.538	Rp2.977.141.914.829	9,37

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

2) Rasio Belanja Operasi

Tabel 14. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase
2019	Rp1.880.683.876.699	Rp2.809.549.444.627	66,94
2020	Rp1.839.589.218.113	Rp2.737.861.916.080	67,19
2021	Rp1.902.638.912.710	Rp2.779.840.698.100	68,44
2022	Rp1.918.270.224.061	Rp2.824.358.293.725	67,92
2023	Rp2.020.914.516.871	Rp2.977.141.914.829	67,88

(Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen, diolah)

Rasio ini membandingkan proporsi belanja operasi dan belanja modal untuk melihat keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Selama lima tahun, belanja operasi Kabupaten Kebumen selalu mendominasi dibandingkan belanja modal. Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebagai berikut: 66,94% (2019), 67,19% (2020), 68,44% (2021), 67,92% (2022), dan 67,88% (2023). Sebaliknya, belanja modal yang mencerminkan investasi daerah terhadap infrastruktur dan pembangunan justru sangat rendah: 13,02% (2019), 10,55% (2020), 9,57% (2021), 9,64% (2022), dan 9,37% (2023). Artinya, alokasi anggaran cenderung digunakan untuk keperluan rutin birokrasi seperti gaji pegawai dan operasional kantor, dan sangat sedikit dialokasikan untuk pembangunan jangka panjang. Tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya alokasi belanja modal yang dapat digunakan untuk menyediakan pelayanan publik dan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini tergolong *kurang baik* karena tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan dan berkelanjutan.

Diskusi

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran di Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan pendapatan daerah yang rendah dan kemandirian fiskal yang lemah menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.

74



Kemandirian fiskal yang terus menurun, dari 24,23% di 2019 menjadi 19,03% pada 2023, mengindikasikan bahwa Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ketergantungan ini dapat menghambat fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal (Sawitri & Usman, 2023). Rasio derajat desentralisasi fiskal yang hanya berada pada kategori “kurang” menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan belum kuat. Ini bisa disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian (Zaelani dkk., 2022).

Efektivitas PAD yang tinggi (>100%) sebenarnya menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai target. Namun, hal ini perlu dianalisis secara kritis, karena bisa juga menandakan target yang terlalu rendah atau konservatif (Putri dkk., 2025). Perlu upaya peningkatan kualitas perencanaan dan estimasi target pendapatan agar bisa mencerminkan potensi daerah sesungguhnya. Penurunan efisiensi pada tahun 2023 (102,62%) patut menjadi perhatian karena menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Jika biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari pendapatannya sendiri, maka ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik akan semakin sempit (Alfiani dkk., 2024).

Komposisi belanja yang tidak seimbang, dengan dominasi belanja operasi, mencerminkan bahwa APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional rutin daripada untuk pembangunan jangka panjang. Padahal, belanja modal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar (Aira, 2014). Ketidakseimbangan ini memperburuk ketimpangan dan memperlambat penurunan angka kemiskinan yang selama ini masih tinggi di Kabupaten Kebumen (BPS, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat sumber PAD, mengarahkan belanja ke sektor produktif, serta meningkatkan efisiensi belanja. Pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi dalam penggalan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat agar mampu mandiri secara fiskal dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Handayani, 2017 dalam Alhabsyi & Gaffar, 2024).

CONCLUSION

Analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Kebumen tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa efektivitas PAD tergolong baik, tetapi pertumbuhan pendapatan dan kemandirian fiskal masih rendah. Belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk operasional daripada pembangunan sehingga belum mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD, menetapkan target yang realistis, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperbesar alokasi belanja modal agar APBD dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini masih terdapat keterbatasan sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian tidak hanya satu kabupaten saja, namun dapat memasukkan beberapa kabupaten serta dapat dibandingkan.

BIBLIOGRAPHY

- Aira, A. (2014). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. *Kutubkhanah*, 17(1), 21-39.
- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74-87. 75



- Alhabsyi, D. T. S., & Gaffar, M. I. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2234-2251.
- Ardiyasa, I. P. (2021). Strategi Peningkatan Stakeholder Baru Organisasi Seni Pertunjukan. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 7(1), 21-30.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2019-2023. Semarang: CV. Surya Lestari.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2024. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen/BPS-Statistics of Kebumen Regency. 25 Mei 2025
- Cindy, F. (2024). Transparansi Penggunaan APBD Dalam Penggunaan Infrastruktur Daerah. *Humani*, 1(1).
- Hafizah, T. Z., & Azzahra, N. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR NEGARA DAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 274-281.
- Handayani, R. (2017). Evaluasi Anggaran dan Efisiensi Belanja dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi. Dalam Alhabsyi & Gaffar (2024), *Economic Reviews Journal*, 3(3).
- Jelahun, F. E. (2022). Aneka Teori dan Jenis Penelitian Kualitatif. Available at: <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>. 28 Mei 2025
- Madaniyah, R. N., & Widiasih, S. (2024). Evaluasi Kinerja Manajemen Dan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020-2022. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 37-46.
- Marlina, C., & Akbar, G. G. (2023). Analisis Kinerja Apbd Provinsi Di Indonesia: Sebuah Studi Mengenai Rasio Keuangan, Korelasi Metrik Dan Klasterisasi Kinerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 615-636.
- Pemkab Buleleng (2024). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA. Available at: https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/89_perencanaan-pembangunan-daerah-menuju-masyarakat-sejahtera. 16 Juni 2024
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 173-183.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45-56.



- Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah. 2022. Penanganan Kemiskinan Jadi Prioritas Pembangunan 2020. Available at: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/penanganan-kemiskinan-jadi-prioritas-pembangunan-2020/>. 24 Mei 2025
- Putri, A. R., Tripriyono, A., & Panggabean, F. Y. (2025). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 531-542.
- Putri, A. R., Tripriyono, A., & Panggabean, F. Y. (2025). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 531-542.
- Sawitri, S. H., & Usman, S. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *Media Bina Ilmiah*, 17(10), 2443-2454.
- Sawitri, S. H., & Usman, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021. *Media Bina Ilmiah*, 17(10), 2443-2454.
- Sukur, D. P., Majid, J., Suhartono, S., & Aditiya, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 152-165.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56-69.
- Zaelani, A., Kusumaningsih, O., Trianfano, A., & Mamuri, J. (2022). Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Kebumen Tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 470-482.
- Zaelani, A., Kusumaningsih, O., Trianfano, A., & Mamuri, J. (2022). Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Kebumen Tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 470-482.

